

**PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DALAM
MENGEMBANGKAN USAHA KECIL PADA KOPERASI ADIL
MAKMUR UNIT III ANTANG KEL. BANGKALA KEC. MANGGALA
KOTA MAKASSAR**

ONGKI LESTARI AYUB

10572 1956 09



No. Buletin	29/08/2022
Tempat	Smb. Alumni
Waktu	P.0467/MAN/22
Penyusun	AYU
No. Buletin	P?



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 017 Tahun 1434 H / 2013 M, dan telah dipertahankan di depan tim penguji pada Hari Jum'at 29 November 2013 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 1 Desember 2013

Panitia Ujian :

Pengawas Umum

: Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.

(.....)

(Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar)

Ketua

: Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A

(.....)

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Sekretaris

: Drs. H. Sultan Saroa, M.Pd

(.....)

PD.I (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Penguji :

1. Dr. Hj. Ruliaty, S.E., MM

(.....)

2. Dra. Murni, M. Si

(.....)

3. Isnail Rasulong, S.E., MM

(.....)

4. Edi Jusriadi, S.E., MM

(.....)





PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DALAM
MENGEMBANGKAN USAHA KECIL PADA KOPREASI ADIL
MAKMUR UNIT III ANTANG KEL. BANGKALA KEC. MANGGALA
KOTA MAKASSAR

ONGKI LESTARI AYUB
10572 1956 09



2013



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peranan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dalam Mengembangkan Usaha Kecil Pada Koperasi Adil Makmur Unit III Antang Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Ongki Lestari Ayub

No. Stambuk : 10572 1956 09

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Makassar, Oktober 2013

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. M. M. Nahung, MA


Ismail Rasu'eng, SE

Mengetahui:

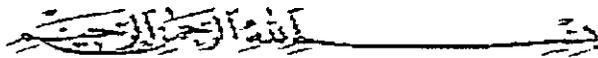
Ketua Jurusan Manajemen


Dr. H. M. M. Nahung, MA


Dra. Murni, M.Si
KTAM. 943926



KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi seluruh hamba-hamba-Nya yang telah memberikan taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita serta memberikan nikmat Islam dan Iman, dan semua nikmat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Amin.

Selama menyusun skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi, namun berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, inaka alhamdulillah kesulitan tersebut dapat diatasi sehingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Irwan Akib, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dra. Murni, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. Mahmud Nuhung, SE, MA selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, bimbingan, dan saran – saran selama penyusunan skripsi



5. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, bimbingan, dan saran – saran selama penyusunan skripsi.
6. Para dosen dan karyawan dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar terkhusus kepada para dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama kuliah.
7. Bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan motivasi selama penulis menjalankan perkuliahan, serta kakakku, terima kasih atas do'a, dan pengarahannya.

Akhir kata semoga semua amal baik yang telah diberikan semua pihak kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, amin.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Makassar, 01 Oktober 2013

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Koperasi	7
B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	15
C. Koperasi Simpan Pinjam	17
D. Kredit.....	18
E. Pengolahan Koperasi Simpan Pinjam	22
F. Rapat Anggota	24



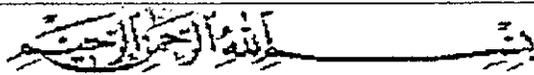
G. Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
B. Metode Pengumpulan Data	31
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Populasi dan Sampel	33
E. Metode Analisis	33
BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI	38
A. Gambaran Umum KSP Adil Makmur	38
B. Visi dan Misi KSP Adil Makmur	39
C. Struktur Organisasi KSP Adil Makmur	40
D. Tugas Pokok dan Fungsi KSP Adil Makmur	43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Responden Penelitian	44
B. Analisis Pendapat Anggota Berdasarkan Responden Penelitian	48
C. Pengembangan Usaha Kecil Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Adil Makmur Unit III Antang	60
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62



LAMPIRAN-LAMPIRAN







KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa : Ongki Lestari Ayub

NIM : 10572 1956 09

Pembimbing : 1. Dr. H. Mahmud Nuhung, MA

: 2. Ismail Rasulong, SE, MM

Topik Skripsi : Peranan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Adil Makmur Unit III Antang Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar dalam Mengembangkan Usaha Kecil

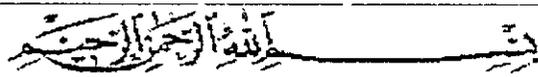
Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf
	<p>- Teknis pengetikan</p> <p>- Klasifikasi / Rincikan Penerimaan Responden sebelum dan sesudah menerima Koost.</p> <p>- Cost/biaya hrs diklasifikasi apa saja dan besarnya untuk usaha.</p> <p>- Tahap yang akan ya terputus</p>	

Catatan: Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian skripsi jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 3 kali.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Dra. Murni, M.Si





KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa : Ongki Lestari Ayub

NIM : 10572 1956 09

Pembimbing : 1. Dr. H. Mahmud Nuhung, MA

: 2. Ismail Rasulong, SE, MM

Topik Skripsi : Peranan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Adil Makmur Unit III Antang Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar dalam Mengembangkan Usaha Kecil.

Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf

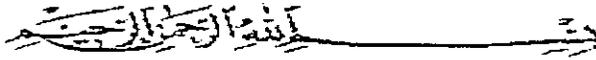
Petunjuk: Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian skripsi jika sudah konsultasi ke Dosen Pembimbing minimal 3 kali.

Mengelahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Dra. Murni, M.Si



KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi seluruh hamba-hamba-Nya yang telah memberikan taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita serta memberikan nikmat Islam dan Iman, dan semua nikmat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Amin.

Selama menyusun skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi, namun berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka alhamdulillah kesulitan tersebut dapat diatasi sehingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Irwan Akib, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dra. Murni, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. Mahmud Nuhung, SE, MA selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, bimbingan, dan saran – saran selama penyusunan skripsi.



5. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, bimbingan, dan saran – saran selama penyusunan skripsi.
6. Para dosen dan karyawan dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar terkhusus kepada para dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama kuliah.
7. Bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan motivasi selama penulis menjalankan perkuliahan, serta kakakku, terima kasih atas do'a, dan pengarahannya.

Akhir kata semoga semua amal baik yang telah diberikan semua pihak kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, amin.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Makassar, 01 Oktober 2013

Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan kekayaan alam yang melimpah, tetap tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan suatu kondisi kekurangan dari kehidupan, khususnya dari aspek konsumsi, pendapatan, dan kebutuhan sosial. Sedangkan pengangguran adalah banyaknya usia produktif yang tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan semua pihak baik dari pemerintahan sampai kepada tiap individu masyarakat.

Kemiskinan dan pengangguran akan berdampak pada perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat naiknya angka kriminal di suatu Negara atau daerah. Dampak lain dari kemiskinan dan pengangguran adalah angka kematian yang akan terus meningkat karena kurang terpenuhinya kebutuhan gizi dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan dan pengangguran harus diatasi oleh tiap Negara termasuk Indonesia agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Koperasi sebagai gerakan ekonomi yang tumbuh dari masyarakat, lebih merupakan organisasi swadaya masyarakat yang lahir



atas kehendak, kekuatan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan tujuan, sasaran kegiatan, serta pelaksanaannya.

Keberadaan koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan nilai yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa : “Perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Kemudian dipertegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa: “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Sebagai badan usaha yang bergerak didalam bidang perekonomian maka koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian maka dikenal dengan jenis-jenis koperasi antara lain koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam (KSP)/kredit, koperasi jasa dan koperasi serba usaha.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 : 11, bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Dimana simpanan anggota akan disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang memerlukan. Keanggotaan koperasi simpan pinjam pada prinsipnya bebas bagi semua orang yang memenuhi untuk menjadi anggota koperasi dan orang-orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, misalnya KSP dengan anggotanya pedagang, KSP dengan anggotanya petani, dan KSP dengan anggotanya nelayan.



Selanjutnya Penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Memperhatikan kedudukan Koperasi tersebut diatas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri yang demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memilih ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kehidupan ekonomi rakyat.

Pengembangan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokrasi, otonom, partisipatif, dan berwatak social. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Salah satu cara untuk meningkatkan dan mengembangkan Usaha Kecil dalam perekonomian adalah pemberian kredit kepada sektor UMKM. Selama ini pemberian kredit banyak dilakukan oleh pihak perbankan dan koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam.



Sementara itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan pembnagunann ekonomi masyarakat. Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah UU Nomor 20 Tahun 2008. Dalam pertimbangan UU ini dikatakan, *a.* bahwa Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi; *b.* bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakans sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, *c.* bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf *b.* perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.



Pada dasarnya pergerakan koperasi juga tidak berorientasi pada keuntungan, karena koperasi berkonsentrasi untuk meningkatkan keuntungan yang diterima anggota, bukan dirinya sendiri, jika koperasi berorientasi keuntungan, koperasi akan mengeksploitasi anggotanya (Baga, 2003).

Salah satu jenis usaha koperasi yang selama ini sering membantu dalam perkembangan Usaha kecil adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah salah satu bentuk koperasi yang mengumpulkan dana dari anggota dan kemudian diberikan lagi kepada anggotanya sebagai bantuan modal untuk dimanfaatkan dalam mengembangkan usahanya. Salah satu koperasi simpan pinjam yang berhasil adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Adil Makmur Unit III Antang Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Peranan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Adil Makmur Unit III Antang Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar Dalam Mengembangkan Usaha Kecil ?
2. Bagaimana sistem penyaluran kredit yang diterapkan KSP Adil Makmur Unit III Antang kepada para anggota Usaha Kecil?



C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Adil Makmur Unit III antang Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar Dalam Pengembangan Usaha Kecil!
- b. Mengetahui sistem penyaluran kredit yang diterapkan oleh KSP Adil Makmur Unit III Antang kepada para anggota Usaha Kecil !

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan, baik kepada pihak perbankan, koperasi, dan Usaha Kecil untuk mengembangkan Usaha Kecil sebagai upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Koperasi

Kata Koperasi memang bukan asli dari khasanah Bahasa Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa ia berasal dari Bahasa Inggris: *co-operation*, *cooperative*, atau Bahasa Latin: *coopere*, atau dalam Bahasa Belanda : *cooperatie*, *cooperatieve*, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerja sama.

Koperasi merupakan organisasi yang unik, berbeda dengan organisasi bisnis lainnya, karena organisasi koperasi merupakan kumpulan orang yang bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui unit usaha yang dimiliki dan dikelola bersama (Baga, *et al* 2009). Menurut Saragih (2000), koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui usaha yang dimiliki bersama secara demokratis.

Menurut *International Cooperative Alliance* (ICA, 1995) koperasi adalah perkumpulan yang otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. ICA menegaskan karakteristik dari koperasi adalah sejauh mungkin bebas dari pemerintah dan perusahaan swasta, memiliki kebebasan untuk mendefinisikan orang-orang sesuai dengan ketentuan hukum yang dipilihnya, keanggotaan dalam koperasi bersifat sukarela. koperasi diorganisir oleh anggotanya untuk



dimanfaatkan oleh anggotanya sendiri, serta dalam koperasi pengendalian dibagi diantara anggota atas dasar demokrasi (Baga, *et al.* 2009).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

Selain itu terdapat beberapa ahli lain yang juga memberikan pengertian Koperasi. Calvert dalam Suhardi (2012 : 9) misalnya, memberi definisi tentang Koperasi sebagai organisasi orang-orang yang berupaya atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing. Sedangkan A. Chaniago yang dikutip dari Suhardi (2009 : 9) member definifi koperasi sebagai perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan



masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Selanjutnya menurut A. Chaniago dalam Suhardi (2012 : 9) memberi definisi koperasi sebagai perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan

Undang-Undang No 25 tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Baga, *et al.* 2009). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka koperasi disejajarkan dengan badan usaha lainnya, yaitu terkena pajak, tidak boleh menjadi monopoli, dan kinerja keberhasilan yang dibandingkan dengan jenis badan usaha lainnya.

Prinsip-prinsip koperasi menurut ICA adalah sebagai berikut (Soedjono, 2001)

1. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka

Prinsip ini menegaskan bahwa koperasi terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa diskriminasi mengenai *gender*, sosial, rasial, politik, atau agama. Selain itu, koperasi bersifat sukarela yang artinya mendasar dari orang-orang yang secara sukarela tanpa paksaan memilih untuk membuat komitmen terhadap koperasi yang dipilih. Setiap calon anggota berhak diberi pemahaman mengenai nilai-nilai untuk apa koperasi



tersebut didirikan, dan mereka harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam koperasi secara bebas.

2. Pengawasan demokrasi oleh anggota

Dalam koperasi, demokrasi mencakup pertimbangan akan hak-hak dan tanggung jawab. Pengendali kebijakan dalam pengambilan keputusan yang demokratis dalam koperasi adalah anggotanya koperasi itu sendiri. Keterlibatan secara aktif dan demokratis oleh anggota biasanya terjadi dalam rapat anggota dimana masalah-masalah kebijakan dibahas, keputusan penting diambil, dan kegiatan penting disetujui.

3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi

Para anggota koperasi memberikan modal secara adil dan mengendalikan modal tersebut secara demokratis. Jika dalam perkembangannya, modal tersebut mendatangkan keuntungan, maka para anggota akan mendapatkan kompensasi yang terbatas. Biasanya anggota-anggota membagi keuntungan tersebut untuk tujuan pengembangan koperasi, membentuk dana cadangan, dan mendukung kegiatan-kegiatan yang disetujui oleh anggota melalui rapat anggota.

4. Otonomi dan kemandirian

Prinsip otonomi ditujukan kepada kebutuhan esensial koperasi untuk tetap otonom, dengan cara sebagaimana perusahaan-perusahaan yang dikendalikan modal untuk tetap otonom dalam hubungannya dengan pemerintah. Koperasi bersifat otonom merupakan perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggotanya. Jika koperasi



mengadakan kesepakatan dengan perkumpulan lain termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber lain, hal ini harus dilakukan dengan persyaratan yang menjamin pengendalian oleh anggota serta otonomi yang harus dipertahankan.

5. Pendidikan, pelatihan, dan penerangan

Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi tersebut. Pendidikan dan pelatihan ini sangat penting karena memberikan kesempatan yang baik bagi pemimpin-pemimpin koperasi untuk dapat memahami kebutuhan para anggotanya. Salin itu, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan diharapkan mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan koperasi dan mampu menyediakan jasa-jasa baru bagi para anggotanya.

6. Kerjasama antar koperasi

Koperasi akan dapat memberikan pelayanan yang paling efektif kepada para anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerjasama melalui struktur-struktur lokal, nasional, regional, dan internasional. Sesungguhnya, koperasi hanya akan dapat memaksimalkan dampak koperasi melalui kerjasama praktis, erat, dan kokoh satu sama lain.

7. Kepedulian terhadap masyarakat



Prinsip ini menekankan bahwa koperasi memiliki tanggung jawab khusus untuk menjamin pembangunan dari komunitasnya dalam arti ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambunga. Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

Fungsi dan peran koperasi dalam Bab III bagian pertama pasal 4 UU RI No. 25 Tahun 1992, yaitu :

1. Membangun potensi dan ekonomi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Mempertahankan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4. Mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan atas asas keadilan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Soedjono (2001) keberhasilan koperasi dari aspek mikro dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi usaha dan segi organisasi. Keberhasilan koperasi dari segi usaha mencakup sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah anggota

Hal ini akan memberikan rasa yakin pada anggota lama dan baru terhadap efektivitas koperasi dalam memenuhi kewajibannya. Anggota



juga akan merasakan adanya manfaat dan keadilan melalui pelaksanaan proses pelayanan koperasi kepada anggotanya.

2. Peningkatan modal, baik berasal dari anggota maupun modal dari luar sebagai pemicu koperasi untuk berkembang. Keberhasilan dalam menghimpun dana dari internal koperasi akan relatif mudah untuk mewujudkan dan menciptakan kemandirian anggota dan koperasi tersebut, dengan demikian ketergantungan dengan pihak luar koperasi akan jauh lebih kecil.

3. Peningkatan jumlah dan volume usaha

Hal ini dapat berupa keragaman kegiatan, barang, dan jasa yang dapat dihasilkan atau dilakukan oleh koperasi sehingga terjadi peningkatan pelayanan kepada anggota baik fisik, kuantitas, maupun kualitas.

4. Peningkatan pelayanan sosial kepada anggota

Koperasi harus mengupayakan langkah-langkah maupun keputusan yang hendaknya mampu menempatkan para anggota merasakan peningkatan pelayanan sosial, seperti mendapatkan pelayanan kesehatan, sumbangan dan pengurusan kematian, dan pemberian beasiswa kepada anggota/anak anggota yang berprestasi. Hal ini diharapkan dapat mempengaruhi kesejahteraan anggota, dan menjadi insentif bagi non anggota untuk bergabung dengan koperasi tersebut.

5. Peningkatan kesejahteraan anggota.



Dapat diukur dari peningkatan pendapatan, kemudahan mendapatkan kebutuhan hidup, dan kemudahan mendapatkan bantuan modal

Menurut Soedjono. (2001) keberhasilan koperasi dari segi organisasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut :

1. Aspek produktivitas, diukur pada prestasi koperasi secara internal, yaitu koperasi dapat menutupi biaya tetap atau memenuhi kewajiban pokok anggota dan pihak ketiga yang berkaitan dengan bisnisnya.
2. Aspek efektivitas, merupakan sasaran yang tepat pada kegiatan yang dilakukan koperasi dan dilakukan secara cermat.
3. Aspek keadilan, yaitu sesuai dengan semboyan “satu untuk semua dan semua untuk satu”.
4. Aspek kemanjuran, yaitu identitas koperasi telah mampu untuk diaplikasikan dengan baik sehingga dapat member rasa puas pada anggotanya

Kriteria keberhasilan koperasi selain dilihat pada aspek mikro, dapat pula dilihat pada aspek makro. Artinya, keberhasilan koperasi dapat dilihat dari peranannya dalam pembangunan perekonomian nasional.

Perkembangan koperasi di negara-negara berkembang didorong inisiatif pemerintah-pemerintah jajahan sebagai bagian dari kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan materiil dari rakyat jajahannya. seperti Indonesia yang dijajah oleh Belanda (Baga, *et al.* 2009). Sejarah perkoperasian Indonesia berawal dari penindasan yang dilakukan penjajah Belanda kepada masyarakat Indonesia, yang



menyebabkan Patih Raden Aria Wiria Atmadja, seorang pegawai negeri di Purwokerto untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat di sekitarnya dari lintah darat, sehingga didirikanlah bank penolong dan penyimpan untuk menolong para pegawai pemerintah. Selanjutnya bank penolong tersebut diperluas tidak hanya untuk pegawai pemerintah saja tetapi juga untuk para petani. Sehingga dalam perkembangannya, koperasi sangat diharapkan mampu memperbaiki nasib para anggotanya. Salah satu cara yang dilakukan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah dengan pemberian kredit kepada anggotanya, termasuk anggota yang bergerak dalam UMKM. Bantuan kredit tersebut diharapkan mampu membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya.

B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Menurut Rudjito (2003) usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha ini adalah Rp 50 juta. Usaha mikro ini adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp 100 juta.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut:



1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Definisi Usaha Kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau



2. Memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

C. Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, mengartikan koperasi simpan pinjam (KSP) sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan. Pada dasarnya KSP melakukan kegiatan sama dengan yang dilakukan pihak bank. KSP menghimpun dana dari anggotanya kemudian disalurkan kembali kepada anggotanya dalam bentuk kredit untuk digunakan sebagai pinjaman modal atau sebagainya. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Pada umumnya usaha simpan pinjam (USP) termasuk koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia tumbuh karena sulit mendapatkan bantuan permodalan melalui sistem pemberian kredit dari perbankan. Koperasi yang tumbuh di Indonesia dimulai dari usaha simpan pinjam. Hal ini telah dikenal sejak jaman Belanda pada tahun 1895 ketika R. Aria Wiriaatmaja mendirikan Koperasi Simpan Pinjam yang bertujuan untuk memberikan fasilitas kredit kepada kelompok masyarakat menengah, kemudian diperluas kepada petani agar mereka tidak terjepit utang pada lintah darat.

Kelangsungan keberadaan USP dan KSP harus didasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Prinsip efisiensi dan efektivitas dapat terwujud jika para pengelola koperasi betul-betul mengarahkan USP dan KSP untuk kepentingan anggotanya.



Keberhasilan KSP bukan hanya tergantung kepada besarnya modal yang diusahakan melainkan pelaksanaannya lebih mendekati adanya saling percaya antar anggota dengan para pengurus dan saling percaya antar anggota. Artinya, didalam USP dan KSP anggota saling memberi dan menerima untuk kepentingan bersama.

Semakin besar jumlah simpanan anggota semakin besar pula dana pinjaman yang dapat dipinjam atau dipergunakan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan usaha dan keperluannya. Oleh sebab itu, karena usaha ini sangat penting bagi anggota dan kegiatan ini memberikan kontribusi atau sumbangan yang berarti bagi anggota, maka diperlukan pengelolaan simpan pinjam yang dinamis, bersih, dan dipercaya. Kepercayaan mendorong partisipasi anggota menabung, meminjam dan meningkatkan usaha kedua belah pihak baik koperasi sebagai usaha simpan pinjam dan anggota sebagai peminjam. USP yang berkembang akan meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Jika SHU meningkat terjadi perkembangan modal yang dapat dimanfaatkan kembali oleh anggota.

D. Kredit

Kredit merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak perbankan kepada masyarakat agar dana dapat tersalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan, atau hasil pembagian keuntungan.



Pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan kredit program bagi agribisnis sejak pendirian Padi Sentra pada tahun 1959 yang menangani penyuluhan, penyaluran, dan pemberian kredit. Kredit tersebut diperuntukkan bagi pembelian sarana produksi dan uang untuk biaya hidup.

Kata kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dalam kredit harus terdapat unsur kepercayaan baik dari pihak pemberi kredit, maupun pihak penerima kredit. Menurut Kasmir (2004), prinsip-prinsip kredit yang dikenal dengan 5C adalah :

1. *Character*, yaitu sifat atau watak calon debitur. Hal ini bertujuan memberikan keyakinan kepada pihak perbankan bahwa sifat dari orang-orang yang akan diberikan kredit dapat dipercaya.
2. *Capacity*, yaitu kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan calon debitur tersebut dalam mengelola bisnis serta kemampuannya mengelola keuntungan.
3. *Capital*, yaitu sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usaha yang dilakukannya.
4. *Collateral*, yaitu jaminan yang diberikan calon debitur yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan yang diberikan dianjurkan melebihi jumlah kredit yang diberikan.
5. *Condition*, yaitu penilaian kredit yang mempertimbangkan kondisi sekarang dan masa yang akan datang.

Jenis-jenis kredit pada dasarnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan jangka waktu



Djinarto (2000) membedakan kredit berdasarkan jangka waktu menjadi tiga macam. Pertama adalah kredit jangka pendek, yaitu kredit dengan rentang waktu maksimal satu tahun. Kedua adalah kredit-menengah, yaitu kredit dengan rentang waktu 1-3 tahun, sedangkan yang ketiga adalah kredit jangka panjang, yaitu kredit dengan rentang waktu minimal tiga tahun.

b. Berdasarkan tujuan penggunaan

Menurut Dendawijaya (2005), berdasarkan tujuan penggunaannya kredit dibedakan menjadi tiga macam. Pertama adalah kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah kredit (debitur) untuk membiayai kepentingan barang modal (investasi). Kedua adalah kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah kredit (debitur) untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan debitur, dan yang terakhir adalah kredit konsumsi, yaitu fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan pembelian barang-barang konsumsi yang diperlukan debitur.

c. Berdasarkan segmentasi

Berdasarkan keterangan Bank Indonesia (2008), segmentasi kredit UMKM dibedakan menjadi tiga macam. Pertama adalah kredit mikro, yaitu kredit dengan pemberian maksimal Rp 50 juta. Kedua adalah kredit kecil, yaitu kredit dengan pemberian antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Terakhir adalah kredit menengah yaitu kredit dengan pemberian antara Rp 500 juta hingga Rp 5 milyar.

Menurut Rachmina (1994), berdasarkan sumbernya, kredit dapat dibedakan antara kredit formal dan non formal. Kredit formal adalah kredit yang berasal dari lembaga keuangan formal, baik lembaga yang berciri bank atau bukan bank.



Sedangkan kredit non formal adalah kredit yang berasal dari lembaga keuangan non formal, seperti pelepas uang atau rentenir, pedagang dan tengkulak, keluarga dan sebagainya. Menurut Suyatno, *et al* (1999), dalam transaksi kredit terdapat unsur-unsur kredit, yaitu :

a. Kepercayaan

Adanya unsur kepercayaan sangat dibutuhkan dalam transaksi kredit, karena dengan memberikan kepercayaan kepada si peminjam dalam bentuk uang, barang, maupun jasa maka diharapkan peminjam dapat memberikan kepada pemberi pinjaman dengan membayar kredit tepat pada waktunya. Kepercayaan biasanya timbul setelah pemberi kredit melakukan analisis lapangan terhadap kemampuan calon nasabah dalam membayar kembali kredit yang diberikan tepat waktu.

b. Waktu

Unsur waktu yang dimaksud adalah bahwa nilai uang yang ada sekarang lebih tinggi daripada uang yang akan diterima kembali pada masa yang akan datang.

c. *Degree of Risk* (Tingkat Risiko)

Tingkat risiko yang dihadapi sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu antara orang yang memberi pinjaman dengan orang yang diberi pinjaman. Dengan kata lain, bahwa semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan, maka akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapinya. Hal ini dikarenakan waktu mempunyai unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan.

d. Prestasi dan Objek Kredit



Setiap pemberian kredit tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa yang semuanya dapat dinilai dengan uang. Dengan kata lain, kredit selalu berhubungan dengan uang.

Peran kredit sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi.

Tambahan modal untuk masyarakat akan dapat terpenuhi dengan adanya kredit.

E. Pengolahan Koperasi Simpan Pinjam

Dalam pengolahan Koperasi Simpan Pinjam hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pengolahan KSP yang dilakukan oleh Pengurus, maka Pengurus bertanggung jawab kepada Anggota.
2. Pengurus KSP dapat mengangkat pengelola atau manajer atau direksi, antara anggota yang terdiridan satu orang atau lebih. Dalam hal pengurus mengangkat pengelola manajer/direksi maka pengawas dapat diangkat apabila dipandang perlu atau sesuai dengan keputusan rapat anggota. Apabila rapat anggota memutuskan tidak perlu mengangkat pengawas maka pengurus berfungsi sebagai pengawasan seperti halnya dengan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. Apabila Keputusan Rapat Anggota mengendaki tetap ada Pengawas maka pengurus menjadi direksi atau manajer yang harus bekerja sepenuh hari (*full time*)
3. Apabila pengurus mengangkat pengelola maka pengurus atau anggota pengurus tidak boleh merangkak jadi pengelola.
4. Apabila pengelola tersebut adalah perorangan, maka pengelola tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 9 Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yaitu:

- a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam;
5. Apabila pengelola lebih dari satu orang, maka pengelola tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yaitu:
- a. Sekurang-kurangnya 50 % dari jumlah pengelola wajib mempunyai dibidang keuangan atau pernah menjagikuti pelatihan di bidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam;
 - b. Diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke satu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping.
6. Apabila pengelola adalah badan usaha, maka pengelola tersebut wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
- a. Memmiliki kemampuan keuangan yang memadai;
 - b. Memiliki keluarga manajerial yang berkualitasa baik.
7. Pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) KSP harus diputuskan oleh Rapat Anggota. Pembagian tersebut setelah dikurangi dana cadangan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:



- a. Dibagikan kepada rapat anggota secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota;
- b. Dibagikan kepada anggota untuk balas jasa yang terbatas terhadap modal (yang berasal dari simpan pokok dan simpanan wajib)
- c. Dibagikan sebagai bagian keuntungan kepada pemegang Surat Perjanjian Modal Pernyataan Koperasi (SPMKOP), sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Membiayai pendidikan dan pelatihan serta peningkatan keterampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi;
- e. Insentif bagi pengelola dan karyawan;
- f. Keperluan lain dalam menunjang kegiatan koperasi.

F. Rapat Anggota

Menurut pasal 17 UU No 25/1992, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka anggota koperasi memiliki peran ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Anggota sebagai pemilik adalah sebagai pemodal koperasi dan arena itu harus memberikan kontribusi modalnya kepada koperasi sesuai ketentuan dalam AD/ART dan keputusan rapat anggota. Anggota sebagai pengguna jasa berhak berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi (Baga, *et al.* 2009).



Organisasi koperasi sendiri mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu Rapat Anggota dan Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT adalah salah satu alat perlengkapan organisasi koperasi. Rapat tersebut dihadiri oleh para anggota, pengurus, pemeriksa, dan pejabat-pejabat koperasi. RAT merupakan tempat dimana suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu tertentu saja (Baga, *et al.* 2009).

Menurut Undang-Undang No. 25/1992 Pasal 22-27, tugas dan peran dari rapat anggota adalah sebagai berikut :

1. Mengesahkan dan menetapkan penyusunan dan perubahan AD/ART, sesuai dengan keputusan rapat.
2. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
3. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur organisasi dan arah kegiatan usahanya .
4. Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar.
5. Menetapkan dan mengesahkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
6. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) .
7. Menetapkan penggabungan, pemecahan dan pembubaran organisasi .
8. Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus :
menerima atau menolak.



Kehadiran dan partisipasi anggota dalam rapat anggota sangat diperlukan, dimana pemikiran dan keinginan anggota-anggota disalurkan. Akan tetapi, karena rapat anggota merupakan suatu forum dan tidak bisa sehari-hari aktif beroperasi maka rapat anggota memberikan kuasa kepada pengurus untuk mengelola koperasi.

Selain RAT yang membahas pertanggungjawaban pengurus dan rapat anggota yang membahas Rencana Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, koperasi dapat mengadakan rapat anggota yang diadakan karena permintaan pengurus, atau karena permintaan yang diajukan oleh sejumlah anggota untuk ketentuan-ketentuan tersebut harus dimasukkan dalam anggaran dasar. Rapat anggota ini disebut Rapat Anggota Luar Biasa (Hendrojogi, 2004).

G. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Menurut Jafar (2004) dalam Lenora (2008), UKM pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan UKM adalah sebagai berikut :

1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif, antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan.

2. Bantuan permodalan



Pemerintah perlu memperluas kredit khusus dengan syarat yang tidak memberatkan UKM untuk membantu peningkatan modal, seperti melalui sektor jasa finansial informal.

3. Perlindungan usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Perlindungan tersebut dapat berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

4. Pengembangan kemitraan

Pengembangan kemitraan yang saling membantu antara UKM perlu dikembangkan. Disamping itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

5. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi, dan pengetahuan, serta keterampilannya. Disamping itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6. Membentuk lembaga khusus

Lembaga khusus ini bertanggung jawab dalam mengkoordinir semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangkan UKM dan juga



berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi UKM.

7. Memantapkan asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat untuk meningkatkan perannya, antara lain dalam mengembangkan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8. Mengembangkan promosi

Guna mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan.

9. Mengembangkan kerjasama yang setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan UKM untuk mengatasi berbagai isu yang terkait dengan perkembangan usaha.

Selain itu, ada juga bisnis yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan UKM adalah sebagai berikut :

1. Perlu dipelajari terlebih dahulu tentang ciri-ciri, definisi atau pengertian, kelemahan-kelebihan, potensi-potensi yang tersedia serta perundang-undangan yang mengatur tentang UKM.
2. Diperlukan bantuan manajerial agar tumbuh inovasi-innovasi dalam mengelola UKM secara berdampingan dengan usaha-usaha besar.
3. Secara vertikal dalam sistem gugus usaha, UKM bisa menjadikan diri sebagai komplemen-komplemen usaha bagi industri perusahaan produsen utama.



Diperlukan suatu strategi UKM untuk menjalin kerja komplementer dengan usaha-usaha besar.

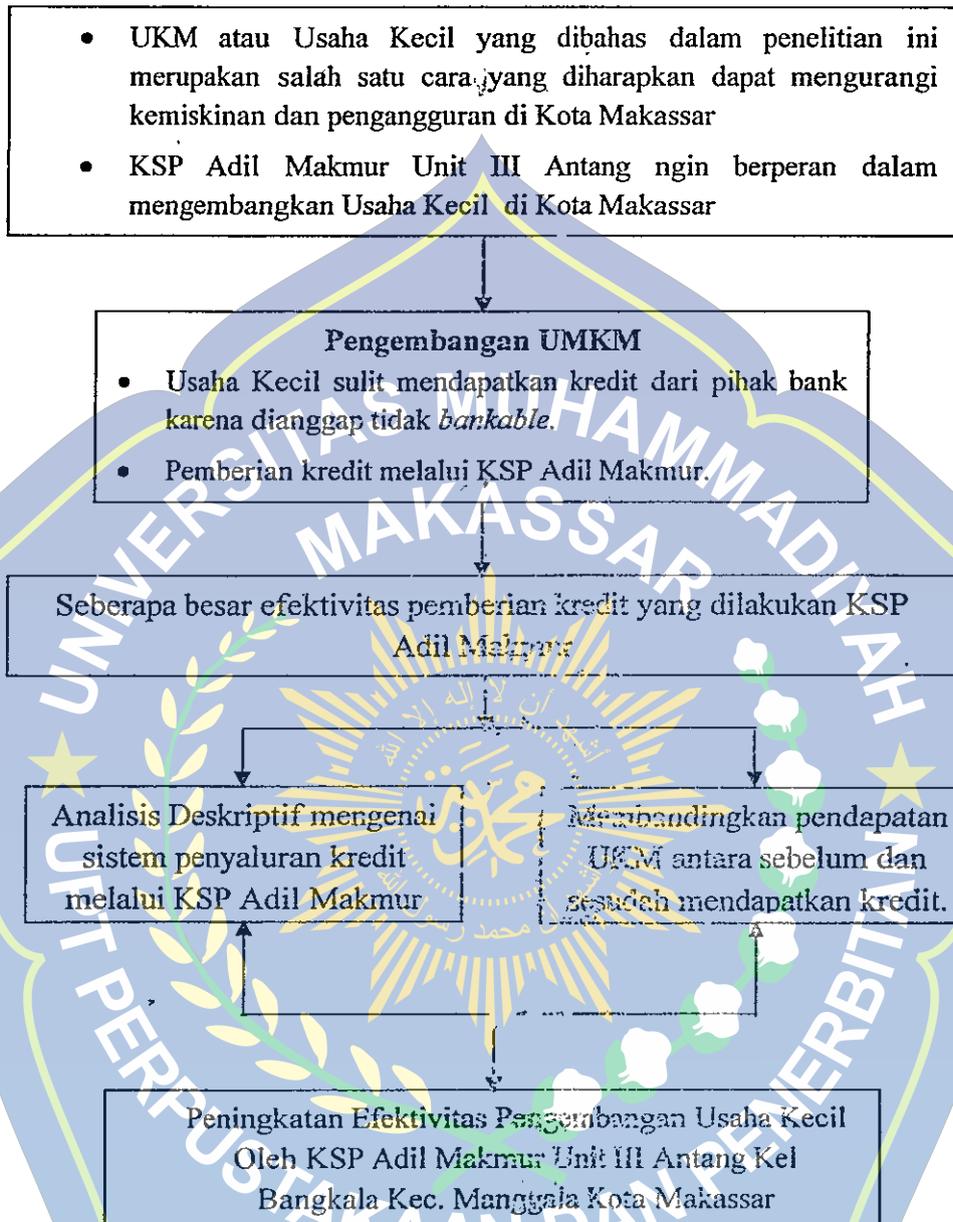
4. Kerjasama bisa berbentuk koperasi dan bersama-sama beroperasi masuk dalam usaha tertentu. Di Indonesia, kemitraan usaha yang berbentuk koperasi merupakan strategi bisnis yang sangat penting, sehingga pemerintah menganggap perlu membentuk departemen khusus untuk menangani UKM dan Koperasi.

2. Kerangka Pemikiran Operasional

Kemiskinan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya pengangguran merupakan permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan pemerintah adalah pembangunan sektor UKM. Hal ini dikarenakan sektor UKM mempunyai potensi yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, sekaligus pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Selain itu, UKM merupakan kegiatan ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat miskin, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi, sektor UKM menghadapi permasalahan keterbatasan modal untuk menjalankan usaha. Hal ini berakibat pada UKM yang tidak dapat berkembang dengan baik.

Pemberian kredit kepada UKM melalui koperasi simpan pinjam yaitu KSP Adil Makmur Unit III Antang merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Peran KSP Adil Makmur dalam perkembangan UKM menggunakan perhitungan analisis pendapatan dan nilai R/C ratio tiap jenis usaha. Gambar kerangka pemikiran operasional dapat dilihat pada Gambar 1.





Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Operasional Peran KSP Adil Makmur Unit III Antang Dalam Perkembangan UKM di Kota Makassar



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Adil Makmur Unit III Antang Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, yang beralamat di Jl. Muhajirin 4 No. 3 Kota Makassar Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) bulan, di mulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam menunjang penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis data

- a) Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Adil Makmur dalam bentuk angka, yaitu menggunakan analisis pendapatan dari tiap jenis usaha yang dijalankan.
- b) Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk keterangan informasi baik secara lisan maupun tulisan

2. Sumber data

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden secara langsung yang merupakan data yang belum pernah dipublikasikan.



- b) Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari pencatatan ,
dokumen,
laporan dan studi kepustakaan.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan membaca atau menelaah buku literatur dan bahan pustaka lainnya yang menyangkut teori-teori yang relevan dengan penulisan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori untuk pembahasannya.

2. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan kunjungan langsung pada objek penelitian yaitu KSP Adil Makmur Unit III Antang Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, kemudian melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait atau yang menangani dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tersebut.

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian lapangan ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Observasi langsung, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang terkait dengan permasalahan yang akan diuraikan



- b) Komunikasi langsung, yaitu pengumpulan data melalui interview dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang nantinya terlibat dalam penelitian di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit III Antang Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar.

D. Populasi dan Sampel

Penentuan responden peranan KSP Adil Makmur dilakukan dengan *purposive sampling* (penentuan secara sengaja), dengan pertimbangan bahwa responden yang terpilih dapat mewakili. Responden yang terpilih adalah karyawan KSP Adil Makmur dan 20 UKM anggota KSP Adil Makmur. Informasi mengenai 20 UKM yang mendapatkan bantuan kredit didapatkan dari karyawan dari KSP Adil Makmur Unit III Antang Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa Manager dan karyawan merupakan pihak yang bisa memberikan informasi yang relevan bagi penelitian ini. Dua puluh UKM penerima kredit retail. Usaha retail yang diberikan bantuan adalah dua warung makan lesehan, jualan makanan jadi, jualan campuran, tiga usaha Warung Sate Kambing, Laundry, dan Foto Copy.

E. Metode Analisis

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang sistem penyaluran kredit kepada UKM dan dampak dari penyaluran kredit terhadap perkembangan UKM Menurut Nazir (2005), metode kualitatif atau deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu

20

4

34



set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah membuat gambaran yang akurat mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Analisis Pendapatan UKM (Usaha Kecil)

Salah satu indikator penilaian kesejahteraan adalah perubahan pendapatan dan pola konsumsi penduduk. Semakin meningkat tingkat pendapatan suatu penduduk maka presentase pengeluaran untuk makanan akan menurun, sehingga tersedia porsi pendapatan yang lebih besar untuk non pangan termasuk untuk digunakan sebagai modal usaha rumah tangga atau mikro.

Lipsey *et al.* (1995) menerangkan bahwa pendapatan atau laba didapatkan dari mengurangi penerimaan total (*total revenue*) dengan biaya total (*total cost*), atau jika ditulis dalam persamaan :

$$\pi = TR - TC$$

$$\pi = (P \cdot q) - (TFC + TVC)$$

Dimana:

π = Pendapatan atau Laba

TR = penerimaan total (*total revenue*)

TC = Biaya Total (*total cost*)

P = Harga Produk

q = Produk Total (*total product*)

TFC = Biaya Tetap Total (*total fixed cost*)

TVC = Biaya Variable Total (*total variable cost*)



Penerimaan total merupakan perkalian antara harga produk dengan produk total atau total penerimaan penjualan produk. Produk total adalah jumlah total yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh semua faktor produksi yang digunakan selama periode tersebut. Sedangkan biaya total merupakan penjumlahan biaya oportunitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi output, yang bisa dibagi menjadi biaya tetap total dan biaya variabel total pada tingkat produksi tertentu.

Biaya tetap total adalah biaya produksi yang tidak bervariasi dengan tingkat output, seperti tanah, pabrik, dan mesin. Sedangkan biaya variabel total adalah total biaya produksi yang bervariasi secara langsung dengan tingkat output, seperti upah atau gaji karyawan.

Peran KSP Adil Makmur dalam penyaluran kredit terhadap pendapatan UKM dapat dilihat dengan membandingkan pendapatan pengusaha UKM sebelum mendapatkan bantuan kredit dengan pendapatan setelah mendapatkan bantuan kredit. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dampak pemberian kredit yang dilakukan KSP Adil Makmur terhadap peningkatan pendapatan pengusaha UKM. Analisis pendapatan ini dilakukan pada satu tahun sebelum pengusaha menerima kredit dan dua tahun setelah mendapatkan kredit. Pendapatan bersih adalah selisih antara pendapatan kotor dan pengeluaran kotor usaha tersebut. Perhitungan pendapatan dilakukan dengan menggunakan formulasi :

$$P = TP - (Bt + Btt)$$

Dimana : P Pendapatan Bersih (Rp)



FP = Total Penerimaan (Rp)

Bt = Biaya Tunai (Rp)

Btt = Biaya tidak Tunai (Rp)

Penerimaan sering disebut juga dengan pendapatan kotor (*gross farm income*), merupakan nilai produk total usaha dalam periode tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Penerimaan diperoleh dari hasil kali antara jumlah produk yang dihasilkan dengan harga jual produk tersebut. Sementara itu pengeluaran total usaha terdiri dari biaya tunai dan biaya tidak tunai (biaya yang diperhitungkan).

3. Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Ratio)

Data yang dikumpulkan melalui wawancara akan dianalisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan pendapatan dengan nilai R/C Ratio masing-masing UKM sebelum dan sesudah menerima kredit. Analisis R/C Ratio merupakan perbandingan (ratio atau nisbah) antara penerimaan (*revenue*) dan biaya (*cost*). Menurut Rahim (2007) pernyataan tersebut dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

$$\begin{array}{ll}
 a & = R/C \text{ Ratio} & C & = FC + VC \\
 R & = P_y \times Y & a & = P_y \times Y / (FC + VC)
 \end{array}$$



Dimana :

a = R/C Ratio

R = Penerimaan (*revenue*)

C = Biaya (*cost*)

Py = Harga Output

Y = Output

FC = Biaya Tetap (*fixed cost*)

VC = Biaya Variabel (*variable cost*)

Kriteria Keputusannya adalah sebagai berikut:

$R/C > 1$, usaha tersebut menguntungkan, sehingga layak untuk diusahakan

$R/C < 1$, usaha tersebut rugi, sehingga tidak layak untuk diusahakan

$R/C = 1$, usaha tersebut impas tapi tetap layak untuk dijalankan

Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dalam suatu usaha yang besar kecilnya tidak tergantung dari besar kecilnya output yang diperoleh, misalnya pajak, sewa lahan, alat-alat produksi, dan mesin produksi. Sedangkan biaya tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang besar kecilnya dipengaruhi oleh perolehan output, misalnya tenaga kerja dan sarana produksi.



BAB IV

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Gambaran Umum KSP Adil Makmur

KSP. Adil Makmur sebelumnya bernama KSP SEPAKAT yang beroperasi dan berkedudukan di jalan cendrawasih IV. sesuai keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 301/BH/KDK.2022/X/1998 dan pada tanggal 9 oktober 1998 pengurus KSP SEPAKAT mengadakan rapat anggota dan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar dan pergantian nama menjadi KSP ADIL MAKMUR
2. Menyetujui perubahan wilayah kerja dari koperasi primer yang beranggota kan Kabupaten / Kota se Sulawesi Selatan menjadi Koperasi Primer Nasional dengan alamat kantor pusat Jln. Cendrawasih IV.
3. Menyetujui penggantian pengurus lama dan susunan pengurus baru 2003 – 2008.
4. Menyetujui masa bakti pengurus dari 4 tahun menjadi 5 tahun dan masa bakti pengawas dari 3 tahun menjadi 5 tahun.
5. Menyetujui perubahan simpanan pokok anggota dari Rp. 150.000 menjadi Rp. 1 000.000.



Pada tanggal 01 Juli 2005, KSP Adil Makmur memulai operasional kantor pusat sekaligus cabang utama di Makassar dan secara bersamaan men-take over kepemilikan 3 (tiga) cabang KSP sepakat masing-masing :

1. KSP SEPAKAT Cab. Cendrawasih Makassar menjadi KSP Adil Makmur Cab. Utama Makassar.
2. KSP SEPAKAT Cab. Malengkeri menjadi KSP Adil Makmur Cab. Malengkeri.
3. KSP SEPAKAT Cab. Tello menjadi KSP Adil Makmur Cab Tello.

Pada tanggal 25 Mei 2008 pengurus KSP Adil Makmur mengadakan rapat anggota luar biasa dan menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui tidak adanya perubahan pengurus.
2. Menyetujui perubahan simpanan :
 - Simpanan pokok anggota dari Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 5.000.000,-.
 - Simpanan wajib anggota menjadi Rp. 1.500.000,-.
3. Anggota memberikan persetujuan dan menyetujui kepada pengurus untuk mengajukan tambahan Modal Kerja maupun pembiayaan baik dari Lembaga Keuangan Perbankan maupun Lembaga Keuangan Non Bank.

B. Visi dan Misi KSP Adil Makmur

a. Misi



Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam yang mandiri dan tanggu dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia.

b. Misi

- Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama, agar mereka dapat bersama - sama, bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara bergotong royong dalam bentuk koperasi.
- Membantu para pedagang kecil dan menengah didalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara aktif dengan mengajak mitra usaha lainnya baik BUMN, swasta, perbankan maupun gerakan koperasi lainnya.

C. Struktur Organisasi KSP Adil Makmur

Pada umumnya struktur organisasi adalah suatu gambaran skematik tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan cara menghubungkan fungsi – fungsi dari suatu badan dan penetapan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya sehingga struktur organisasi KSP Adil Makmur memegang peranan penting dalam pembagian fungsi – fungsi Dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerja antara satu dengan Yang lain



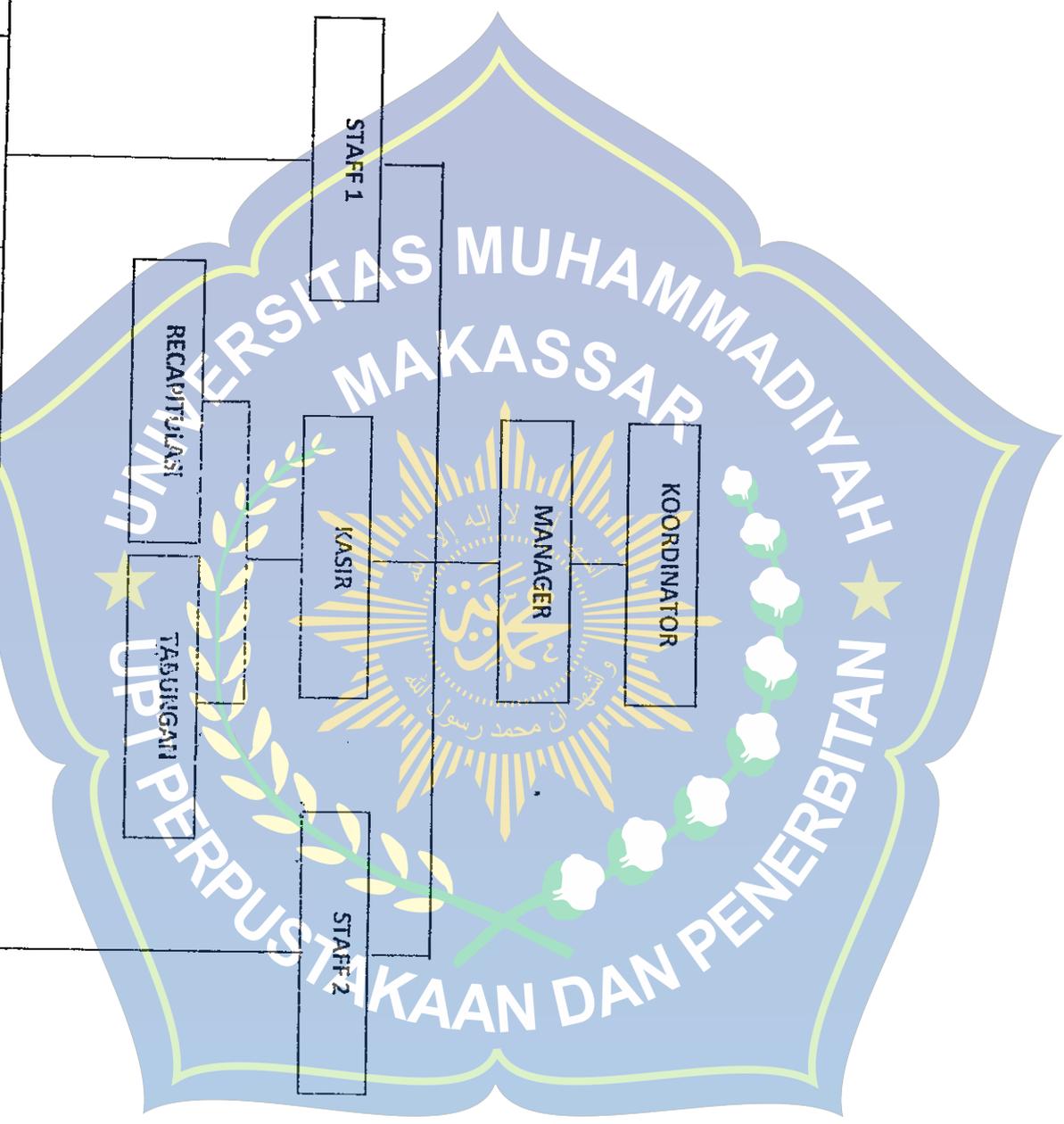
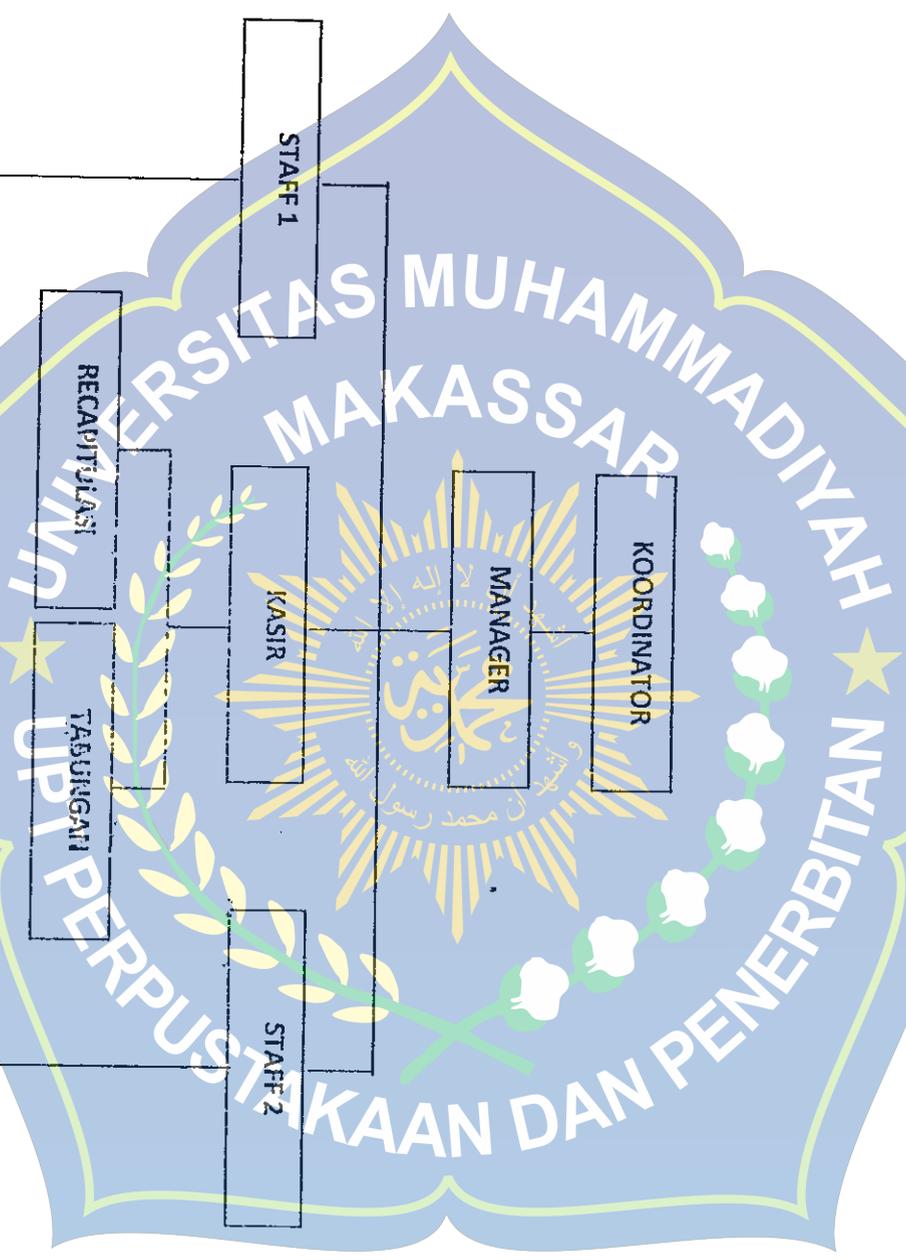
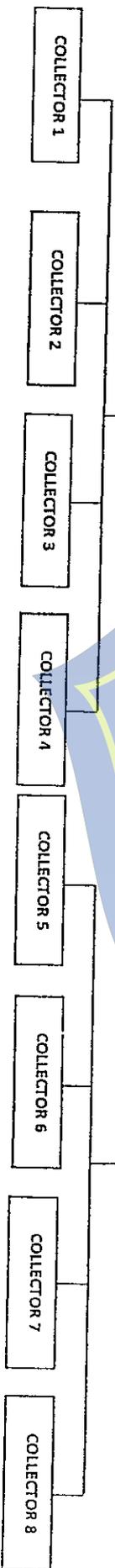
Pelaksanaan tugas harian Koperasi Simpan Pinjam Adil Makmur dipimpin oleh Koordinator, sedangkan struktur organisasinya terbagi menjadi struktur organisasi kantor pusat dan struktur organisasi kantor cabang. Yang akan dibahas pada skripsi ini adalah Struktur organisasi kantor Cabang terdiri atas:

- a. Koordinator
- b. Manager
- c. Staff
- d. Kasir
- e. Recapitulasi
- f. Tabungan
- g. Colector

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.









D. Tugas pokok dan Fungsi KSP Adil Makmur

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Koperasi dan Usaha mikro Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koprasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan tugas di bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta pemberdayaan koperasi simpan pinjam lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.



pinjaman yang dapat diberikan adalah 60 persen dari nilai sertifikat dan 50 persen dari nilai BPKB.

5. Jarak lokasi usaha

Jarak lokasi usaha yang biasanya dapat diberikan kredit adalah lokasi usaha yang masih berada di cakupan wilayah Makassar. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak KSP Adil Makmur untuk melakukan pemeriksaan ke tempat usaha sebelum pencairan kredit. Selain itu, dengan lokasi yang masih berada di daerah Makassar, maka pihak Kospin Adil Makmur dapat dengan mudah melakukan penagihan pembayaran pinjaman pada pihak peminjam.

Faktor lain yang menjadi acuan untuk memberikan kredit adalah karakter calon peminjam. Tujuan dari mengetahui karakter calon peminjam kredit ini adalah agar pihak KSP Adil Makmur mengetahui peminjam memiliki karakter yang baik atau tidak. Karakter calon peminjam dapat dilihat dari riwayat pinjaman yang calon peminjam pernah lakukan dan keaktifan pihak peminjam selama menjadi anggota koperasi. Selain itu, *capacity* atau kapasitas juga menjadi bahan pertimbangan dalam pencairan kredit. Mengetahui kapasitas calon peminjam dapat dilakukan dengan mengetahui pendapatan bersih usaha dalam setahun dan mengetahui jumlah pengeluaran. Semakin besar pendapatan bersih usaha maka akan memudahkan calon peminjam untuk memperoleh bantuan kredit. Sedangkan prinsip *collateral* tidak dilakukan analisis penilaian yang mendalam. Prinsip ini hanya dilakukan dengan sebatas melihat apakah jaminan yang diajukan calon peminjam adalah benar milik pribadi calon peminjam. *Capital* yang merupakan sumber pembiayaan bagi calon peminjam untuk mengembalikan pinjaman dapat



dilihat dari jenis Usaha Kecil yang dijalankan dan memeriksa apakah calon penerima kredit memiliki sumber keuangan lain selain usaha yang akan diberikan kredit. Sedangkan *Condition of Economy* dijadikan acuan bagi pihak KSP, in Adil Makmur dalam melakukan penilaian bagaimana kondisi Usaha Kecil saat pengajuan kredit dan prediksi Usaha Kecil di masa yang akan datang. Karakteristik Responden dapat dilihat pada tabel

Tabel 1 : Karakteristik Responden

No.	Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
1.	Jenis Usaha Retail	20 orang	100
	Jumlah	✓ 20 orang	100
2.	Usia		
	20 tahun-40 tahun	11 orang	55
	> 40 tahun	9 orang	45
	Jumlah	✓ 20 orang	100
3.	Pendidikan Terakhir		
	SMU sederajat	9 orang	45
	> D3	11 orang	55
	Jumlah	✓ 20 orang	100
4.	Jenis Agunan		
	Sertifikat	15 orang	75
	BPKB	5 orang	25
	Jumlah	✓ 20 orang	100
5.	Jarak Lokasi Usaha dengan KSP Adil Makmur		
	1 km-20 km	14 orang	70
	> 20 km	6 orang	30
	Jumlah	✓ 20 orang	100

Sumber : Data Primer (Diolah, 2013)

Karakteristik responden berdasarkan Tabel terbagi menjadi beberapa kriteria, yaitu jenis usaha, usia peminjam, pendidikan terakhir, lama usaha dijalankan, jenis agunan, jarak lokasi usaha dengan KSP Adil Makmur, dan skala usaha. Jenis usaha Usaha Kecil yang diberikan kredit terbagi menjadi usaha retail, dimana jenis usaha yang diberikan bantuan kredit yaitu sebesar 100 persen. Syarat usia yang bisa diberikan kredit adalah diatas dua puluh tahun. Akan tetapi, pada



KSP Adil Makmur usia peminjam yang berumur 20-40 tahun lebih banyak diberikan bantuan kredit yaitu sebesar 55 persen. Pendidikan terakhir yang lebih banyak diberikan kredit adalah D3 sebesar 55 persen.

Faktor lain yang menjadi penentu adalah lama usaha dijalankan, hal ini terlihat pada usaha yang dijalankan berumur lebih dari dua tahun lebih banyak mendapatkan bantuan kredit, yaitu sebesar 60 persen atau sebanyak 12 pengusaha. Jenis agunan yang biasa dijadikan jaminan pada KSP Adil Makmur hanya dua, yaitu sertifikat dan BPKB, dimana sertifikat lebih banyak dijadikan agunan yaitu sebanyak 15 pengusaha atau sebesar 75 persen. Jarak lokasi usaha dengan kantor KSP Adil Makmur merupakan faktor yang menjadi pertimbangan. Lokasi usaha harus masih berada di sekitar Makassar. Pemberian kredit kepada pelaku usaha juga sedikit banyak berpengaruh pada skala usaha yang dijalankan, dimana usaha usaha kecil dengan jumlah kekayaan tidak lebih dari Rp 500 juta lebih banyak mengajukan kredit, yaitu sebesar 100 persen atau sebanyak 20 pelaku usaha.

Semua faktor tersebut sangat berpengaruh pada pendapatan yang akan diterima oleh masing-masing Usaha Kecil penerima kredit. Parameter yang digunakan dalam analisis adalah pendapatan usaha rata-rata, yaitu total penerimaan usaha dikurangi dengan total biaya pengeluaran Usaha Kecil. Pendapatan usaha diperoleh dengan cara mengurangi penerimaan rata-rata dengan biaya rata-rata yang dikeluarkan.

Penerimaan Usaha Kecil adalah nilai produksi yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan Usaha Kecil merupakan hasil perkalian antara jumlah produksi total dengan harga jual dari hasil produksi tersebut. Sedangkan



biaya yang dikeluarkan yakni nilai penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam melakukan proses produksi usaha tersebut. Dikarenakan Usaha Kecil yang menjadi anggota KSP Adil Makmur bergerak diberbagai bidang usaha, maka nilai penerimaan diperoleh dengan cara menghitung rata-rata jumlah penerimaan dari tiap jenis usaha kecil. Demikian pula dengan biaya yang harus dikeluarkan, dikarenakan berbeda karakter usaha, maka biaya yang diambil adalah total rata-rata dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan masing-masing Usaha Kecil.

B. Analisis Pendapatan Anggota Berdasarkan Responden Penelitian

1. Pendapat UKM Berdasarkan Jenis Usaha

Pendapatan UKM berdasarkan jenis usaha bisa didapatkan melalui perhitungan pengurangan antara jumlah penerimaan dan biaya yang harus dikeluarkan. Penerimaan UKM sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit berdasarkan jenis usahanya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Rincian Penerimaan UKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha UKM	Penerimaan Rata-rata Sebelum Kredit (Rp)	Penerimaan Rata-rata Sesudah kredit (Rp)	Perbedaan penerimaan (Rp)
1.	Retail	225.000.000	510.000.000	(+) 285.000.000
	Total Penerimaan	225.000.000	510.000.000	(+) 285.000.000

Sumber : Data Primer (Diolah, 2013)

Tabel 2 menjelaskan bahwa jumlah total penerimaan UKM sebelum menerima kredit adalah sebesar Rp 225.000.000, sedangkan total penerimaan UKM setelah pemberian kredit adalah sebesar Rp 510.000.000, dengan selisih



penerimaan sebelum dan sesudah menerima kredit adalah meningkat sebesar Rp 285.000.000. Pemberian kredit yang dilakukan KSP Adil Makmur berdampak pada peningkatan penerimaan UKM. Hal ini terjadi karena dengan adanya bantuan kredit, UKM mampu meningkatkan skala usahanya, atau menambah input produksi untuk meningkatkan jumlah produksi usaha. Peningkatan penerimaan juga berpengaruh pada peningkatan biaya operasional usaha. Rincian biaya yang dikeluarkan UKM sebelum dan sesudah menerima kredit berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rincian Biaya yang harus dikeluarkan UKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit

No	Jenis Usaha UKM	Penerimaan Rata-rata Sebelum Kredit (Rp)	Penerimaan Rata-rata Sesudah kredit (Rp)	Perbedaan penerimaan (Rp)
1.	Retail	175.000.000	358.800.000	(+) 183.800.000
	Total Penerimaan	175.000.000	358.800.000	(+) 183.800.000

Sumber : Data Primer (Dio, 2013)

Tabel 12 menjelaskan bahwa biaya total yang harus dikeluarkan UKM sebelum menerima kredit dari KSP Adil Makmur adalah Rp 175.000.000 dan total biaya yang harus dikeluarkan UKM setelah menerima kredit adalah sebesar Rp 358.800.000, dengan selisih biaya sebelum dan sesudah bantuan kredit adalah sebesar Rp 183.800.000. Sedangkan rincian perhitungan pendapatan UKM sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 4. Rincian Pendapatan UKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit

358

285.800
183.000

102.800.000



No	Uraian	Nilai Rata-rata Sebelum Kredit (Rp)	Nilai Rata-rata Setelah Kredit (Rp)
1.	a. Penerimaan Retail	225.000.000.	510.000.000
	b. Biaya Retail	175.000.000	358.800.000
	c. Pendapatan (a-b)	50.000000	151.200.000
	d. R/C Ratio (a:b)	1,28	1,42
2.	a. Total Penerimaan	225.000.000	510.000.000
	b. Total Biaya	175.000.000	358.800.000
	c. Total Pendapatan (a-b)	50.000000	151.200.000
	d. R/C Ratio (a:b)	1,28	1,42

Sumber : Data Primer (Diolah, 2013)

UKM yang bergerak dalam bidang retail merasakan manfaat yang baik setelah menerima kredit dari KSP Adil Makmur. Penerimaan yang awalnya hanya sebesar Rp 225.000.000 meningkat sebesar 38,77 persen menjadi Rp 510.000.000 setelah menerima kredit. Disisi lain, biaya operasional juga meningkat sebesar 34,43 persen dari sebesar Rp 175.000.000 menjadi Rp 358.800.000. Peningkatan biaya ini tidak menjadikan pendapatan yang diterima usaha menurun, melainkan naik sebesar 50,29 persen dari sebelum kredit sebesar Rp 50.000.000 menjadi Rp 151.200.000 setelah kredit. Peningkatan pendapatan ini juga berdampak pada nilai R/C ratio yang meningkat dari sebelum kredit sebesar 1,28 menjadi 1,42 setelah kredit, yang artinya sebelum kredit tiap Rp 1 yang dikeluarkan UKM akan mendatangkan penerimaan sebesar Rp 1,28, dan tiap Rp 1 yang dikeluarkan UKM setelah kredit akan mendatangkan penerimaan sebesar Rp 1,42.

Pada dasarnya, peningkatan penerimaan yang diperoleh dari jenis usaha disebabkan oleh bantuan kredit yang diberikan KSP Adil Makmur dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, baik dalam penambahan input, maupun untuk memperbanyak cabang usaha. Pemberian kredit yang dilakukan KSP Adil Makmur pada jenis usaha retail tidak hanya menyebabkan peningkatan



penerimaan saja, melainkan juga menyebabkan peningkatan biaya yang harus dikeluarkan. Akan tetapi, peningkatan penerimaan dan biaya secara rata-rata menyebabkan peningkatan pendapatan dan R/C ratio jenis usaha retail, yang artinya bahwa usaha yang diberikan bantuan kredit oleh KSP Adil Makmur memang layak untuk dijalankan dan layak untuk menerima bantuan kredit.

2. Pendapatan UKM Berdasarkan Usia Pengusaha

Pendapatan UKM tidak hanya dihitung berdasarkan jenis usaha yang dijalankan saja, melainkan dihitung pula berdasarkan tiap-tiap karakteristik UKM tersebut. Pendapatan UKM yang dihitung berdasarkan usia pengusaha juga dihitung berdasarkan penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Rincian penerimaan UKM berdasarkan usianya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 : Rincian Penerimaan UKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Usia

No.	Usia Pengusaha UKM	Penerimaan Rata-Rata Sebelum Menerima Kredit (Rp)	Penerimaan Rata-Rata Sesudah Menerima Kredit (Rp)	Perbedaan Penerimaan (Rp)
1.	20 - 40 Tahun	150.000.000	150.000.000	(+) 70.000.000
2.	> 40 Tahun	160.000.000	385.000.000	(+) 200.000.000
	Total Penerimaan	260.000.000	535.000.000	(+) 270.000.000

Sumber : Data Primer (Diolah, 2022)

Tabel 5 menjelaskan bahwa terjadi perubahan penerimaan yang diperoleh UKM sebelum dan sesudah pemberian kredit. UKM dengan tingkat usia antara 20 tahun-40 tahun meningkat sebesar Rp 70.000.0000 dan usia diatas 40 tahun meningkat sebesar Rp 200.000.000. Secara keseluruhan perubahan penerimaan tersebut meningkat sebesar Rp 270.000.000. Rincian biaya yang harus dikeluarkan dapat dilihat pada Tabel 6.



Tabel 6. Rincian Biaya yang harus dikeluarkan UKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Usia.

No	Usia Pengusaha UKM	Penerimaan Rata-rata Sebelum Kredit (Rp)	Penerimaan Rata-rata Sesudah kredit (Rp)	Perbedaan penerimaan (Rp)
1.	20 – 40 tahun	67.887.142	98.800.000	(+) 31.712.858
2.	> 40 tahun	61.020.000	85.660.000	(+) 24.640.000
	Total Penerimaan	128.907.142	184.460.000	(+) 56.352858

Sumber : Data Primer (Diolah, 2013)

Tabel 6 menjelaskan bahwa saat penerimaan meningkat, biaya yang harus dikeluarkan pun meningkat. Hal ini terlihat pada tingkat usia antara 20 tahun-40 tahun biaya yang harus dikeluarkan meningkat sebesar Rp 31.712.858. Sedangkan untuk usia diatas 40 tahun biaya yang dikeluarkan meningkat sebesar Rp 24.640.000. rincian pendapatan UKM sebelum berdasarkan usia pengusaha dapat dilihat pada Tabel 7

Tabel 7. Rincian Pendapatan UKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Usia Pengusaha

No	Uraian	Nilai Rata-rata Sebelum Kredit (Rp)	Nilai Rata-rata Setelah Kredit (Rp)
1.	Usia 20 tahun-40 tahun		
	a. Penerimaan	80.000.000	150.000.000
	b. Biaya	67.087.142	98.800.000
	c. Pendapatan (a-b)	12.912.858	51.200.000
	d. R/C Ratio (a:b)	1,19	1,51
2.	Usia > 40 tahun		
	a. Penerimaan	180.000.000	385.000.000
	b. Biaya	61.020.000	85.660.000
	c. Pendapatan (a-b)	118.980.000	299.430.000
	d. R/C Ratio (a:b)	2,95	4,49
3.	a. Total Penerimaan	260.000.000	535.000.000
	b. Total Biaya	128.107.142	184.460.000
	c. Total Pendapatan (a-b)	131.892.858	350.540.000
	d. R/C Ratio (a:b)	2,03	2,90

Sumber : Data Primer (Diolah, 2013)



Tabel 7 menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapatan antara pengusaha UKM yang berumur antara 20-40 tahun dengan pengusaha yang berumur diatas 40 tahun. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada nilai R/C Ratio, dimana pengusaha yang berumur antara 20-40 tahun R/C Rationya meningkat dari 1,19 sebelum kredit menjadi 1,51 setelah kredit. Sedangkan pengusaha dengan umur diatas 40 tahun nilai R/C Rationya jauh lebih tinggi yaitu 2,95 sebelum kredit menjadi 4,49 setelah kredit. Akan tetapi, kedua tingkatan usia pengusaha tetap layak diberikan bantuan kredit. Hal ini dapat dilihat pada hasil R/C Ratio total yang meningkat dari 2,03 sebelum kredit menjadi 2,9 setelah kredit.

3. Pendapatan UKM Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendapatan UKM juga bisa dihitung berdasarkan pendidikan terakhir anggota KSP Adil Makmur yang menerima bantuan kredit. Pendapatan tersebut dihitung berdasarkan penerimaan dan biaya yang dikeluarkan UKM yang menerima bantuan kredit. Rincian penerimaan UKM berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 : Rincian Penerimaan UKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Penerimaan Rata-Rata Sebelum Kredit (Rp)	Penerimaan Rata-Rata Sesudah Kredit (Rp)	Perbedaan Penerimaan (Rp)
1.	SMU Sederajat	50.550.000	130.450.000	(+) 79.900.000
2.	> D3	145.300.000	215.000.000	(+) 69.700.000
	Total Penerimaan	195.850.000	345.450.000	(+) 149.600.000

Sumber : Data Primer (Diolah, 2013)

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa penerimaan UKM dengan pendidikan terakhir SMU sederajat adalah sebesar Rp 50.550.000 sebelum kredit



dan meningkat menjadi Rp 130.450.000 setelah kredit. Sedangkan penerimaan UKM dengan pendidikan terakhir D3 ke atas adalah sebesar Rp 145.300.000 sebelum kredit dan Rp 215.000.000 setelah kredit. Rincian biaya yang harus dikeluarkan dapat dilihat pada Tabel 9

Tabel 9. Rincian Biaya yang harus dikeluarkan UKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Usia Pengusaha UKM	Penerimaan Rata-rata Sebelum Kredit (Rp)	Penerimaan Rata-rata Sesudah Kredit (Rp)	Perbedaan penerimaan (Rp)
1.	SMU Sederajat	35.245.140	56.800.000	(+) 21.554.860
2.	> D3	53.500.000	74.660.000	(+) 20.160.000
	Total Penerimaan	88.745.140	131.460.000	(+) 41.714.860

Sumber : Data Primer (Diolah, 2013)

Tabel 9 menjelaskan bahwa peningkatan biaya juga terjadi pada UKM berdasarkan pendidikan terakhir. Biaya yang harus dikeluarkan UKM dengan pendidikan terakhir SMU sederajat meningkat sebesar Rp 21.554.860, sedangkan pendidikan terakhir D3 ke atas meningkat sebesar Rp 20.160.000, peningkatan penerimaan dan biaya ini berpengaruh pada peningkatan pendapatan UKM.. Rincian pendapatan UKM berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Rincian Pendapatan UKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Usia Pengusaha



No	Uraian	Nilai Rata-rata Sebelum Kredit (Rp)	Nilai Rata-rata Setelah Kredit (Rp)
1.	SMU Sederajat		
	a. Penerimaan	50.550.000	130.450.000
	b. Biaya	35.245.140	56.800.000
	c. Pendapatan (a-b)	15.404.860	73.650.000
	d. R/C Ratio (a:b)	1,43	2,29
2.	> D3		
	a. Penerimaan	145.300.000	215.000.000
	b. Biaya	53.500.000	73.660.000
	c. Pendapatan (a-b)	91.800.000	138.340.000
	d. R/C Ratio (a:b)	2,71	2,91
3.	a. Total Penerimaan	195.850.000	345.450.000
	b. Total Biaya	88.745.140	130.460.000
	c. Total Pendapatan (a-b)	107.104.860	214.990.000
	d. R/C Ratio (a:b)	2,20	2,64

Sumber: Data Primer (Diolah, 2013)

Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa masing-masing tingkat pendidikan layak diberikan bantuan kredit karena nilai R/C Rationya meningkat. Jenis pendidikan terakhir SMU sederajat nilai R/C Ratio meningkat dari 1,43 sebelum kredit menjadi 2,29 setelah kredit. Sedangkan pendidikan terakhir D3 ke atas meningkat dari 2,71 sebelum kredit menjadi 2,91 setelah kredit. Secara total, pendidikan terakhir mengalami peningkatan pendapatan dan nilai R/C Ratio, dari 2,20 sebelum kredit menjadi 2,64 setelah kredit. Artinya, tiap Rp 1 yang dikeluarkan UKM akan mendapatkan penerimaan sebesar 2,20 sebelum kredit dan 2,64 setelah kredit dari KSP Adil Makmur Unit III Antang.

4. Pendapatan UKM Agribisnis Berdasarkan Jenis Agunan

Jenis agunan yang biasa digunakan untuk jaminan dalam proses pencairan kredit pada KSP Adil Makmur adalah BPKB dan sertifikat. Jenis agunan ini berpengaruh pula pada jumlah penerimaan, biaya yang dikeluarkan, dan



pendapatan UKM setelah mendapatkan kredit dari KSP Adil Makmur. Rincian penerimaan dapat dilihat pada Tabel 11

Tabel 11 : Rincian Penerimaan UKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Jenis Agunan

No.	Jenis Agunan	Penerimaan Rata-Rata Sebelum Kredit (Rp)	Penerimaan Rata-Rata Sesudah Kredit (Rp)	Perbedaan Penerimaan (Rp)
1.	BPKB	20.450.000	47.250.000	(+) 26.800.000
2.	Sertifikat	90.300.000	157.400.000	(+) 93.900.000
	Total Penerimaan	110.750.000	204.650.000	(+) 193.900.000

Sumber : Data Primer (Diolah, 2013)

Tabel 11 menjelaskan bahwa jumlah penerimaan meningkat untuk UKM dengan BPKB sebagai jaminan atau UKM dengan sertifikat sebagai jaminan. Dimana untuk UKM yang menggunakan BPKB sebagai jaminan jumlah penerimaan meningkat sebesar Rp 26.800.000, sedangkan untuk UKM yang menggunakan sertifikat sebagai agunan penerimaannya meningkat dari Rp 90.300.000 sebelum kredit menjadi Rp 157.400.000 setelah kredit, atau meningkat sebesar Rp 93.900.000. Peningkatan penerimaan ini juga diikuti oleh peningkatan biaya. Rincian biaya dapat dilihat pada Tabel 12

Tabel 12. Rincian Biaya yang harus dikeluarkan UKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Jenis Agunan

No	Jenis Agunan	Penerimaan Rata-rata Sebelum Kredit (Rp)	Penerimaan Rata-rata Sesudah kredit (Rp)	Perbedaan penerimaan (Rp)
1.	BPKB	2.500.000	4.520.000	(+) 2.020.000
2.	Sertifikat	59.988.000	83.050.000	(+) 23.062.000
	Total Penerimaan	62.488.000	87.570.000	(+) 25.082.000

Sumber : Data Primer (Diolah, 2013)



Rincian biaya pada Tabel 12 menjelaskan bahwa UKM yang menggunakan sertifikat sebagai jaminan meningkat lebih besar dari yang menggunakan BPKB. Hal ini disebabkan dari 20 UKM yang mendapatkan kredit dari KSP Adil Makmur 25 persennya menggunakan BPKB sebagai jaminan dalam mendapatkan kredit. UKM yang menggunakan BPKB biayanya meningkat sebesar Rp. 2.020.000 dan yang menggunakan sertifikat biayanya meningkat sebesar Rp 23.062.000. Peningkatan penerimaan dan biaya ini tentu saja berdampak pada perubahan pendapatan UKM. Rincian pendapatan UKM berdasarkan jenis agunan dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Rincian Pendapatan UKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Jenis Agunan

No	Uraian	Nilai Rata-rata Sebelum Kredit (Rp)	Nilai Rata-rata Setelah Kredit (Rp)
1.	BPKB		
	a. Penerimaan	20.450.000	47.250.000
	b. Biaya	2.500.000	4.520.000
	c. Pendapatan (a-b)	17.950.000	43.000.000
	d. R/C Ratio (a:b)	8,18	10,45
2.	Sertifikat		
	a. Penerimaan	90.300.000	157.400.000
	b. Biaya	59.988.000	83.050.000
	c. Pendapatan (a-b)	30.312.000	74.350.000
	d. R/C Ratio (a:b)	1,50	1,89
3.	Total		
	a. Total Penerimaan	110.750.000	204.650.000
	b. Total Biaya	62.488.000	87.570.000
	c. Total Pendapatan (a-b)	48.262.000	117.080
	d. R/C Ratio (a:b)	1,77	2,33

Sumber : Data Primer (Diolah, 2013)

Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa jenis agunan, yaitu BPKB dan sertifikat mengalami peningkatan R/C Ratio dari 1,77 sebelum kredit menjadi 2,33 setelah kredit. UKM yang menjadikan BPKB sebagai jaminan, usahanya mendapatkan R/C Ratio 8,18 sebelum kredit dan meningkat menjadi 10,45 setelah



kredit. Sedangkan jika sertifikat yang dijadikan jaminan, nilai R/C Ratio meningkat dari 1,50 sebelum kredit menjadi 1,89 setelah kredit, yang artinya kedua jenis agunan yang dijadikan jaminan saat mengajukan permohonan kredit layak untuk diberikan bantuan kredit oleh KSP Adil Makmur karena mendatangkan keuntungan bagi UKM tersebut.

5. Pendapatan UKM Berdasarkan Jarak Lokasi Usaha

Jarak lokasi usaha dengan KSP Adil Makmur juga merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit yang dilakukan KSP Adil Makmur kepada anggotanya. Dimana, KSP Adil Makmur lebih mendahulukan UKM anggotanya yang berjarak tidak terlalu jauh dari KSP Adil Makmur. Hal ini dikarenakan pertimbangan kemudahan KSP Adil Makmur untuk melakukan pengecekan terhadap UKM tersebut sekaligus mempermudah UKM dalam pengembalian pinjaman. Pemberian kredit ini tentu berdampak pada penerimaan, biaya, dan pendapatan UKM. Rincian penerimaan UKM berdasarkan jarak lokasi usaha dapat dilihat pada Tabel 14

Tabel 14 : Rincian Penerimaan UKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Jarak Lokasi Usaha

No.	Jarak Lokasi Usaha	Penerimaan Rata-Rata Sebelum Kredit (Rp)	Penerimaan Rata-Rata Sesudah Kredit (Rp)	Perbedaan Penerimaan (Rp)
1.	< 1 km-2 km	125.250.000	277.250.000	(+) 152.000.000
2.	> 2km	49.225.000	109.125.000	(+) 59.900.000
	Total Penerimaan	174.475.000	386.375.000	(+) 211.900.000

Sumber : Data Primer (Diolah. 2013)



Berdasarkan Tabel 14 diketahui bahwa jarak lokasi usaha berpengaruh pada peningkatan penerimaan. Dimana, lokasi usaha yang berjarak < 1 km-2 km penerimaannya meningkat sebesar Rp 152.000.000. Sedangkan yang berjarak > 2km meningkat sebesar Rp 59.900.000. Akan tetapi, tidak hanya penerimaan yang meningkat, jumlah biaya yang harus dikeluarkan UKM juga meningkat setelah menerima kredit. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 15

Tabel 15. Rincian Biaya yang harus dikeluarkan UKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Jarak Lokasi Usaha

No	Jarak lokasi Usaha	Penerimaan Rata-rata Sebelum Kredit (Rp)	Penerimaan Rata-rata Setelah Kredit (Rp)	Perbedaan penerimaan (Rp)
1.	< 1 km-2 km	50.751.250	98.550.000	(+) 47.798.750
2.	> 2km	29.875.000	62.585.000	(+) 32.710.000
	Total Penerimaan	80.626.250	161.135.000	(+) 80.508.750

Sumber : Data Primer (Diolah, 2013)

Tabel 15 menjelaskan bahwa peningkatan biaya juga terjadi pada UKM dengan jarak lokasi <1 km-2 km KSP Adil Makmur. Dimana biaya yang harus dikeluarkan meningkat sebesar Rp 47.798.750. Sedangkan UKM dengan jarak lokasi usaha > 2 km dari KSP Adil Makmur biayanya meningkat sebesar Rp 32.710.000. Peningkatan biaya ini akan berdampak pada perubahan pendapatan UKM. Rincian pendapatan UKM berdasarkan jarak lokasi usaha dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Rincian Pendapatan UKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Jarak Lokasi Usaha



No	Uraian	Nilai Rata-rata Sebelum Kredit (Rp)	Nilai Rata-rata Setelah Kredit (Rp)
1.	>1 km-20 km		
	a. Penerimaan	125.250.000	277.250.000
	b. Biaya	50.751.250	98.550.000
	c. Pendapatan (a-b)	74.498.750	178.700.000
	d. R/C Ratio (a:b)	2,46	2,81
2.	> 20 km		
	a. Penerimaan	49.225.000	109.125.000
	b. Biaya	29.875.000	62.585.000
	c. Pendapatan (a-b)	19.350.000	46.540.000
	d. R/C Ratio (a:b)	1,64	1,74
3.	a. Total Penerimaan	174.475.000	386.375.000
	b. Total Biaya	80.626.250	161.135.000
	c. Total Pendapatan (a-b)	93.849.000	225.240.000
	d. R/C Ratio (a:b)	2,16	2,39

Sumber : Data Primer (Diolah, 2013)

Nilai R/C Ratio UKM berdasarkan jarak lokasi usaha pada Tabel 15 menjelaskan bahwa masing-masing jarak tersebut layak diberikan bantuan kredit. Hal ini dikarenakan nilai R/C Ratio meningkat antara sebelum kredit dan setelah kredit, yaitu dari 2,16 menjadi 2,39. R/C Ratio untuk usaha yang berjarak kurang dari 1 km hingga 20 km bernilai 2,46 sebelum kredit dan meningkat menjadi 2,81 setelah kredit. Sedangkan untuk UKM yang berjarak lebih dari 20 km R/C ratio sebelum kredit 1,64 mengalami peningkatan menjadi 1,74 setelah menerima kredit dari KSP Adil Makmur.

C. Pengembangan Usaha Kecil Anggota Keporasi Simpan Pinjam (KSP)

Adil Makmur Unit III Antang

Usaha yang diberikan bantuan kredit oleh KSP Adil Makmur yaitu retail adalah jenis usaha yang sangat layak diberikan bantuan kredit. Usaha Retail ini mendatangkan keuntungan bagi UKM dan KSP Adil Makmur. Jenis usaha retail



adalah jenis usaha yang paling besar merasakan manfaat dari pemberian kredit yang dilakukan oleh KSP Adil Makmur. Hal ini dikarenakan jenis usaha retail adalah usaha yang besar nilai R/C rasionya, yaitu dari 1,51 sebelum kredit menjadi 1,91 setelah kredit, diikuti oleh jenis usaha retail dengan R/C ratio bernilai 1,28 sebelum kredit menjadi 1,43 setelah kredit.

Manfaat dari pemberian kredit ini terlihat pada peningkatan pendapatan yang diterima UKM sebelum dan sesudah menerima kredit. Secara keseluruhan, pemberian kredit yang dilakukan KSP Adil Makmur memang memberikan manfaat yang besar bagi pelaku usaha.

Peningkatan R/C ratio yang tidak merata dikarenakan sebaran respondennya pun tidak merata. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kesempatan tiap-tiap anggota UKM untuk mendapatkan kredit dari KSP Adil Makmur, karena semua UMK memiliki nilai R/C ratio lebih dari 1. Selain itu, manfaat tersebut juga akan dirasakan oleh pelaku usaha, karena dengan kredit yang diberikan KSP Adil Makmur, pelaku usaha akan mampu mengembangkan dan meningkatkan usahanya, sehingga diharapkan mampu membantu dalam usaha pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan yang terjadi di Makassar dan KSP Adil Makmur terus mampu memberikan bantuan kredit sebagai peran dalam perkembangan UKM di Kota Makassar. Selain itu, KSP Adil Makmur juga akan merasakan manfaat dalam penyaluran kredit yang tepat guna, karena ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat umum pada KSP Adil Makmur, sehingga memungkinkan KSP Adil Makmur akan lebih banyak lagi mendapatkan anggota baru dalam perkembangan koperasinya.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1 Sistem penyaluran kredit atau simpan pinjam yang diterapkan oleh Pihak KSP Adil Makmur sejauh ini bisa dijalankan oleh tiap-tiap anggota yang mengajukan kredit. Dimana calon peminjam hanya membuat Surat Permohonan Kredit (SPK) yang dilengkapi berkas yang harus dipersiapkan seperti fotocopy identitas diri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy keterangan jumlah pendapatan, dan fotocopy surat keterangan usaha. Setelah itu, pihak KSP Adil Makmur menganalisis secara ekonomi dan yuridis jenis usaha yang mengajukan permohonan kredit dan yang dijadikan jaminan. Jika setelah dilakukan analisis dan hasilnya baik maka Manager akan memberikan keputusan pinjaman. Jika keputusan pinjaman telah diberikan maka manager akan melakukan pencairan kredit dan mempersiapkan kredit dengan administrasi pinjamannya.

2 Pemberian kredit yang dilakukan KSP Adil Makmur kepada UKM anggotanya merupakan salah satu usaha KSP Adil Makmur untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dua puluh UKM yang menerima simpanan pinjam atau bantuan kredit mempunyai tujuh usaha retail.

B. Saran

Mengacu pada temuan penelitian dan kesimpulan di atas maka berikut ini disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya memperkuat dan mengembangkan koperasi simpan pinjam.



1. Kepada Pengelola Koperasi Simpan Pinjam Adil Makmur di Kota Makassar

Peranan koperasi simpan pinjam sangat penting dalam perekonomian di Kota Makassar. Oleh karena itu, pengelola koperasi simpan pinjam harus berfokus pada peningkatan pelayanan secara lebih luas. Masih ada ribuan orang Indonesia yang ingin memanfaatkan pinjaman, jadi koperasi simpan pinjam di Kota Makassar harus lebih aktif dalam mencari anggota. Selanjutnya, harus ada lebih banyak fokus kepada pengembangan ketrampilan anggota. Dan mengembangkan Jenis Usaha Menengah keatas atau UMKM. Jadi, koperasi simpan pinjam harus meningkatkan tingkat pendidikan yang diberikan kepada anggota. Selain faktor-faktor tersebut, koperasi simpan pinjam harus berusaha untuk menjadi lebih berhasil di semua kegiatan. Harus ada tujuan dan harapan untuk masa depan dan selalu harus berfokus kepada mengatasi masalah dan mengembangkan pelayanan baru yang lebih baik.

2. Kepada Pemerintah Indonesia:

Pemerintah Indonesia harus mempunyai arah kebijakan yang lebih baik terhadap koperasi simpan pinjam. Untuk maju dan berkembang secara berarti, pemerintah harus memberikan dorongan dan pembinaan kepada koperasi simpan pinjam yang sudah ada di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia harus membantu proses pendirian koperasi, dengan jalan pembinaan dari pemerintah, dengan demikian akan mengurangi penyalahgunaan oleh pengelola koperasi simpan pinjam. Kalau ada peraturan dan prosedur yang lebih ketat, serta sistem audit, jalan koperasi simpan pinjam akan lebih lancar lagi



Koperasi simpan pinjam merupakan kunci besar dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Koperasi simpan pinjam menyediakan pelayanan sederhana yang diperlukan oleh kelas bawah dalam mencari jalan keluar dari keadaan yang susah. Koperasi simpan pinjam sudah membantu ribuan orang Indonesia. Dengan keterlibatan pemerintah dan koperasi secara tegas dan berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan bahwa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.





DAFTAR PUSTAKA

- Hudiyanto, *Sistem Koperasi: Ideologi & Pengelolaan*, 2002, UII Press, Yogyakarta.
- Kartasapoetra, G., Kartasapoetra, Ir, AG, Drs. Bambang S, Drs A Setiady, *Koperasi Indonesia*, 2003, PT Bina Adiaksara & PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Koperasi Setia Bhakti Wanita, <http://www.setiabhaktiwanita.com>
- Marjanto Danusaputro, Jusuf M. Colter, Pandu Sukarto, *Monetisasi Pedesaan: Bunga Rampai Keuangan Pedesaan*, 1991, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, LPPI, Jakarta.
- Nugroho, Heru, *Uang, Rentenir & Hutang Pinang di Jawa*, 2001, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Remenyi J., *Where Credit is Due: Income Generating Programs for the Poor in Developing Countries*, 1991, London.
- Saragih. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia. 2000*, PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Soetrisno, Dr. Noer, *Koperasi Indonesia: Potret & Tantangan*, Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat.
- Suhardi, Taufik Makarno, Fauziah. *Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. 2012*. Pannata Puri Media: Jakarta
- Widiyanit, Dr. Ninik, Y.W. Sunindhia, *Koperasi & Perekonomian Indonesia*, 2003, PT Rineka Cipta & PT Bina Adiaksara, Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Yunus, Muhammad, *Banker to the Poor*, 1998, London.



Lampiran 1

Rincian Responden Berdasarkan Karakteristik

Responden	Jenis Usaha	Usia (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Jenis Agunan	Jarak Lokasi Usaha
1	Retail	35	SMK	BPKB	30
2	Retail	30	SMA	BPKB	30
3	Retail	38	D3	Sertifikat	11
4	Retail	29	D3	Sertifikat	7
5	Retail	45	S1	Sertifikat	22
6	Retail	50	D3	Sertifikat	4
7	Retail	36	S1	BPKB	15
8	Retail	46	SMA	BPKB	2
9	Retail	26	SMA	BPKB	4
10	Retail	40	S1	Sertifikat	3
11	Retail	30	D3	Sertifikat	5
12	Retail	40	D3	Sertifikat	8
13	Retail	38	SMK	Sertifikat	22
14	Retail	30	SMU	Sertifikat	2
15	Retail	42	SMU	Sertifikat	3
16	Retail	53	S1	Sertifikat	11
17	Retail	41	SMU	Sertifikat	30
18	Retail	55	SMU	Sertifikat	7
19	Retail	48	D3	Sertifikat	25
20	Retail	45	D3	sertifikat	20

Sumber : Data Primer (Diolah, 2013)

UNIVERSITAS MAHASARAJA
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



Lampiran 2

Rincian Penerimaan Responden Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit

No.	Karakteristik Responden	Penerimaan Sebelum Kredit (Rp)	Penerimaan Setelah Kredit (Rp)
1.	Jenis Pekerjaan Retribusi	225.000.000	510.000.000
2.	Usia		
	• 30 tahun -- 50 tahun		
	30 tahun	5.000.000	9.000.000
	31 tahun	6.500.000	12.000.000
	32 tahun	7.000.000	13.000.000
	33 tahun	9.500.000	16.000.000
	34 tahun	6.000.000	12.000.000
	35 tahun	7.000.000	14.000.000
	36 tahun	9.500.000	17.000.000
	37 tahun	7.000.000	14.000.000
	38 tahun	6.000.000	12.000.000
	39 tahun	8.000.000	15.000.000
	40 tahun	8.500.000	16.000.000
	41 tahun	5.000.000	9.000.000
	42 tahun	20.000.000	40.000.000
	43 tahun	20.000.000	39.500.000
	44 tahun	18.000.000	42.000.000
	45 tahun	20.000.000	50.000.000
	46 tahun	20.000.000	50.000.000
	47 tahun	19.000.000	41.000.000
	48 tahun	17.000.000	35.000.000
	49 tahun	20.000.000	43.000.000
	50 tahun	20.000.000	40.000.000



No.	Karakteristik Responden	Penerimaan Sebelum Kredit (Rp)	Penerimaan Setelah Kredit (Rp)
3.	Pendidikan Terakhir • SMU Sedrajat		
	SMK	4.500.000	12.450.000
	SMA	7.550.000	13.000.000
	SMA	5.000.000	14.000.000
	SMA	6.500.000	15.000.000
	SMK	5.000.000	16.000.000
	SMU	5.000.000	15.000.000
	SMU	5.500.000	15.000.000
	SMU	5.000.000	14.000.000
	SMU	6.500.000	16.000.000
	• >D3		
	D3	14.000.000	19.000.000
	D3	11.500.000	20.000.000
	S1	12.500.000	20.000.000
	D3	12.000.000	19.000.000
	S1	12.000.000	18.000.000
	S1	11.300.000	18.000.000
	D3	14.000.000	20.000.000
	D3	12.000.000	21.000.000
	S1	15.000.000	19.000.000
	D3	16.000.000	20.000.000
	D3	15.000.000	21.000.000

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
 MAKASSAR
 UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



No.	Karakteristik Responden	Penerimaan Sebelum Kredit (Rp)	Penerimaan Setelah Kredit (Rp)
4.	Jenis Agunan		
	• BPKB		
	BPKB	4.250.000	9.500.000
	BPKB	5.000.000	9.250.000
	BPKB	4.000.000	10.500.000
	BPKB	4.100.000	9.000.000
	BPKB	3.100.000	9.000.000
	• Sertifikat		
	Sertifikat	7.000.000	10.500.000
	Sertifikat	5.200.000	9.000.000
	Sertifikat	8.000.000	12.000.000
	Sertifikat	5.000.000	10.000.000
	Sertifikat	7.000.000	11.000.000
	Sertifikat	4.000.000	9.000.000
	Sertifikat	4.500.000	9.000.000
	Sertifikat	10.000.000	17.000.000
	Sertifikat	5.500.000	9.000.000
	Sertifikat	6.100.000	9.500.000
	Sertifikat	5.000.000	8.250.000
	Sertifikat	5.000.000	12.000.000
	Sertifikat	4.500.000	10.000.000
	Sertifikat	6.000.000	11.150.000
	Sertifikat	7.000.000	10.000.000





Lampiran 3

Rincian Perhitungan Penerimaan dan Biaya Jenis Usaha Sebelum dan Sesudah Kredit Per Tahun

No.	Jenis Usaha	Penerimaan Sebelum Kredit (Rp)	Penerimaan Sebelum Kredit (Rp)
1.	Penerimaan		
	Retail		
	• Jualan Lesehan	38.000.000	70.000.000
	• Jualan Makanan Jadi	26.000.000	62.000.000
	• Jualan Campuran	77.000.000	170.000.000
	• Foto Copy	84.000.000	203.000.000
		Biaya Sebelum Kredit (Rp)	Biaya Setelah Kredit (Rp)
	Biaya		
	Retail		
	• Jualan Lesehan	20.000.000	40.000.000
	• Jualan Makanan Jadi	19.000.000	63.000.000
	• Jualan Campuran	61.000.000	98.000.000
	• Foto Copy	75.000.000	123.000.000

Sumber : Data Primer (Diolah, 2013)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
 MAKASSAR
 PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



Lampiran 4

Daftar Wawancara Penelitian

KUESIONER

**PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) DALAM
MENGEMBANGKAN USAHA KECIL PADA KOPERASI ADIL
MAKMUR UNIT III ANTANG KEL. BANGKALA KEC. MANGGALA
KOTA MAKASSAR**

Oleh Ongki Lestari Ayub (10572 1956 09)
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Makassar

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Alamat :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan Utama :
Jenis Usaha Retail :

KARAKTERISRIK RESPONDEN

1. Apakah usaha kecil yang dijalankan merupakan mata pencarian utama?
2. Sejak kapan usaha kecil dijalankan?
3. Bagaimana status usaha kecil yang dijalankan?
4. Darimana sumber modal pertama saat mendirikan usaha kecil?
5. Berapa rata-rata hasil produk dari sektor usaha kecil yang dijalankan dalam setahun?
6. Berapa rata-rata harga jual produk yang dihasilkan?
7. Biaya apa saja yang dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan usaha kecil?
8. Berapa besarnya biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha kecil?
9. Kemana biasanya pengusaha memasarkan produknya?



No.	Karakteristik Responden	Penerimaan Sebelum Kredit (Rp)	Penerimaan Setelah Kredit (Rp)
5.	Jarak Lokasi Usaha		
	• < 1 km – 2 km		
	11	10.500.000	20.500.000
	7	8.000.000	19.350.000
	4	9.500.000	18.000.000
	15	10.500.000	20.000.000
	2	8.000.000	16.000.000
	4	9.500.000	17.000.000
	3	9.500.000	18.000.000
	5	8.500.000	17.250.000
	8	8.000.000	19.000.000
	2	8.500.000	21.000.000
	3	8.250.000	22.150.000
	11	8.500.000	20.000.000
	7	9.500.000	23.000.000
	11	9.500.000	24.000.000
	• > 2 km		
	30	8.250.000	17.125.000
	22	8.300.000	18.000.000
	22	8.225.000	16.000.000
	30	7.100.000	21.000.000
	25	9.100.000	20.000.000
	20	9.250.000	19.000.000

